

Tyanti, E.A.R., Muljanto, M.A (2024). Penerapan Pelayanan Program Puspaga Melalui Website SIAP-PPAK Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya. *Prediksi*. Vol. 23 (1) 57-64.

Penerapan Pelayanan Program Puspaga Melalui Website SIAP-PPAK Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya

Esya Ananta Riski Tyanti^{1*}, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

Email: 21041010106@student.upnjatim.ac.id, magusmuljanto@upnjatim.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

21 Januari 2024

Received in revised form:

22 Februari 2024

Accepted:

17 Maret 2024

Keyword:

Assistance, Puspaga, Consultation, SIAP-PPAK, Media.

Kata Kunci:

Pelayanan, Puspaga, Konsultasi, SIAP-PPAK, Media.

ABSTRACT

A typical family problem is the way of communication. In the face of this problem, the government has issued a program to help the community address problems that occur in the family: the center or center of learning. Not only did the surabaya city government open a service online or through a website called the women and child protection information system (standby). The methods used in this study by using approaches to the policy implementation model theory of merilee s. grindle with primary data of interviews and observations in the field as executors of Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Whereas, secondary data through previous research articles. The result of this study is the ease that people receive because of prepared websites specifically on telekonsultation menus. Although not many people are aware of the website, governments continue to work with promotional efforts in various media.

ABSTRAK

Permasalahan keluarga yang biasanya terjadi adalah dari cara komunikasi. Dalam menghadapi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan sebuah program untuk dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di keluarga yaitu dengan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Tak hanya itu Pemerintah Kota Surabaya membuka layanan dengan sistem online atau melalui website yang dinamakan Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP-PPAK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan melalui teori model Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan data primer berupa wawancara dan pengamatan di lapangan sebagai pelaksana program Mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Sedangkan, data sekunder melalui artikel penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah kemudahan yang diterima oleh masyarakat karena adanya website SIAP-PPAK khususnya pada menu telekonsultasi. Meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui website ini pemerintah tetap mengupayakan dengan upaya promotif di berbagai media.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: 21041010106@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 277,75 juta jumlah penduduk di Indonesia, jumlah ini merupakan jumlah tertinggi di bandingkan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Indonesia tercatat sebanyak 88,93 juta (Kusnadar, 2023).

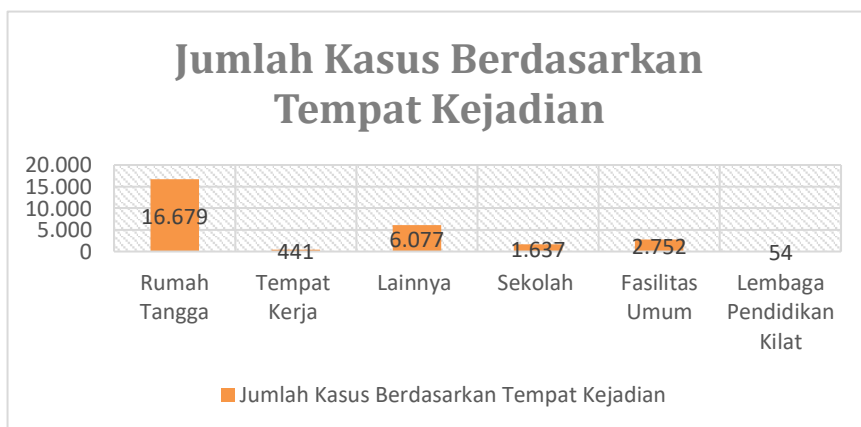
Keluarga adalah sebuah sistem sosial terkecil dan unik yang terdapat pada kehidupan pada biasanya (Fazirah, 2022). Menurut Ahmadi (2002) dalam (Rosita et al., 2021) menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan dalam kesatuan terhadap pengaruh satu sama lain, oleh sebab itu dalam berkeluarga dapat ditanamkan kebersamaan dan mendapatkan kebahagiaan. Namun, di dalam sebuah keluarga rentan adanya rasa ketidaknyamanan yang membuat keluarga merasa kurang atau tidak bahagia. Maka hal tersebut dapat memicu sebuah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan membutuhkan cara yang tepat dalam penyelesaiannya.

Permasalahan keluarga yang biasanya terjadi adalah dari cara komunikasi. Komunikasi yang tidak sepeham, perbedaan pendapat, dan rasa ego yang tinggi akan menimbulkan pertikaian dari sebuah keluarga. Komunikasi adalah sebuah cara untuk berinteraksi antara dua orang atau lebih serta suatu unsur yang memberikan sumber dan penerima untuk mendirikan sebuah kebersamaan, memperoleh tujuan bersama dan saling memahami satu sama lain (Rahmawati, 2018).

Dari sebuah komunikasi yang tidak tepat maka akan membentuk tindakan yang salah seperti pertikaian, kekerasan, perceraian, dan lain sebagainya. Permasalahan dalam keluarga akan dimulai dari hal terkecil hingga hal terbesar yang dapat menyebabkan pertentangan-pertentangan yang hadir tanpa penyelesaian, sehingga akan menjadi sebuah beban adab dan berakibat pada gangguan hal ini psikologi seseorang, dikarenakan seseorang dalam keluarga tidak memumpuni dalam mencari jalan keluar dan memiliki daya untuk menghadapinya (Rosita et al., 2021).

Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 mencatat bahwa kasus kekerasan lebih sering terjadi di rumah tangga yaitu 16.679 kasus tercatat.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Thn 2023

Inilah yang terjadi di lapangan, padahal setiap individu menginginkan adanya rasa aman dan nyaman apalagi dalam berkeluarga. Menurut Fitri et al., (2015) terdapat indikator dalam konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia, yaitu adanya rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*) yang harus terpenuhi untuk sebuah kesejahteraan bagi manusia.

Banyaknya permasalahan yang ada di dalam sebuah keluarga dan penyelesaian yang berbeda-beda mengindikasikan bahwa masyarakat belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan seseorang dalam keluarga memiliki ego, prespektif, dan pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu terkadang seseorang memerlukan bantuan dari orang yang lebih profesional pada bidangnya. Seseorang ini adalah seseorang yang terpercaya, yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga sehingga dapat mempertahankan posisi dalam keluarga agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan

Dalam menghadapi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan sebuah program untuk dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di keluarga yaitu dengan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Sebagai sebuah unit layanan Puspaga merupakan pelaksanaan mandat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 2. Pusat Pembelajaran Keluarga merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pemerintahan dibawah insatansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tingkat nasional, kota maupun kabupaten (Abdullah, 2020).

Layanan ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga Kota Surabaya dengan mengajak beberapa unsur masyarakat untuk dapat menggunakan layanan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian upaya pemerintah belum dapat dikatakan maksimal, pasalnya Puspaga Balai RW cenderung belum di ketahui oleh masyarakat. Apalagi dengan layanan konsultasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang masih menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat karena kurangnya jaminan kerahasiaan karena masyarakat berkonsultasi dengan cara mengunjungi balai RW terdekat di wilayahnya. Namun, permasalahan yang terjadi tidak menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya saat ini membuka layanan dengan sistem online atau melalui website, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK). Hal ini sebagai langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan dan menjamin kerahasiaan bagi masyarakat karena dapat dilakukan dimana saja serta memilih waktu yang diinginkan.

Tujuan dari penalising ini adalah untuk mengukur kesiapan pemerintah khususnya DP3APPKB dalam implementasi kebijakan melalui pelayanan yang terdapat dala website SIAP-PPAK sekaligus daya tanggap dari DP3APPKB jika terdapat pengaduan atau pelayanan dalam konsultasi/konseling.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah dalam bentuk Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

Kegiatan ini disesuaikan dengan jadwal yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya

yang dilaksanakan pada tanggal 1 September sampai 31 Desember 2023 di Balai RW 5 Mojo Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Pada penelitian menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik atau *thick description*. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle yang terdiri dua dimensi yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*).

Data primer berupa wawancara dan pengamatan di lapangan, data sekunder berupa artikel penelitian terdahulu. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan mengambil informan atau narasumber pegawai dari DP3APPKB.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

Pada indikator ini berhubungan dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dibuat. Menurut Grindle (1980) dalam (Khusufmawati et al., 2021) *Interest Affected* adalah sebuah peluang yang ada untuk melihat sejauh mana kebijakan dibuat dapat membuat suatu transformasi pada hubungan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat.

Dalam Hal ini website SIAP-PPAK dibuat untuk masyarakat khususnya warga Surabaya. Hal ini disampaikan oleh Hendra Setiawan selaku pegawai dari DP3APPKB bahwasannya warga Kota Surabaya dapat menggunakan layanan konseling/konsultasi yang adai di Puspaga, serta belajar terkait dengan meningkatkan ketahanan keluarga. Konseling/konsultasi juga dapat dilakukan melalui website SIAP-PPAK pada fitur telekonsultasi.

Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Dari adanya suatu kebijakan maka terdapat manfaat yang diperlukan. Hal ini agar suatu kebijakan dapat memberikan suatu perubahan yang berkualitas pada masyarakat.

Hendra Setiawan mengatakan bahwa puspaga sendiri dari adanya website SIAP-PPAK memiliki harapan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan adanya website ini. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Harapannya masyarakat dapat menggunakan layanan konseling/konsultasi secara online di Puspaga, serta dapat meningkatkan ketahanan keluarga dan mengakses informasi KIE yang telah disediakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya” (Wawancara Hendra Setiawan, Pegawai DP3APPKB, 4 Januari 2023)

Selain itu terdapat manfaat lainnya dari website SIAP-PPAK yaitu sebagai tujuan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan Perempuan dan anak, termasuk adanya tindakan kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, maupun *trafficking* yang terjadi agar dapat ditangani dengan cepat, tuntas, dan tepat.

Derajat Perubahan yang di Inginkan (*Extent of Change Envision*)

Dalam kebijakan yang dibuat ini terdapat derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Hendra Setiawan bahwa pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal mengenai penggunaan SIAP-PPAK yang disampaikan sebagai berikut:

"Adanya website ini dapat memberikan dampak kepada warga masyarakat yang terkendala jarak untuk ke Puspaga Kota, selain itu dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta fleksibilitas melalui penggunaan layanan konseling/konsultasi pada SIAP-PPAK" (Wawancara Hendra Setiawan, Pegawai DP3APPKB, 4 Januari 2023)

Maka dari itu, adanya website SIAP-PPAK ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Puspaga Kota yang bertepatan di Mall Pelayanan Publik Jl. Tunjungan No. 1-3, Gedung Ex. Siola, Lantai 2, Kota Surabaya. Serta masyarakat dapat memilih sendiri jadwal konseling/konsultasi yang dapat dilakukan dimana saja, sehingga privasi pada sesi konseling/konsultasi lebih terjaga.

Kedudukan Pembuat Kebijakan (*Position of Policy Maker*)

Adanya kebijakan ini berlandaskan dari mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak.

Adanya Puspaga Balai RW adalah salah satu cara Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat menerapkan prinsip "*One Stop Service*" atau yang biasa dikenal dengan Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak.

Selain itu dalam mengaplikasikan mandat, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan dengan pelayanan website SIAP-PPAK guna membantu masyarakat dalam mengakses website dengan lebih mudah dan cepat. Website SIAP-PPAK dalam proses pengimplementasiannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 4 Ayat 2 poin C terkait Mekanisme Layanan, Fungsi Layanan, dan Sistem Informasi Data. Serta, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 4A terkait dengan Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam melaksanakan sebuah program Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melibatkan beberapa pelaksana yaitu Kepada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala UPTD PPA, beserta unsur yang ada didalamnya. Selain itu terdapat kerjasama dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan aplikasi SIAP-PPAK.

Sumber Daya yang Digunakan (*Resourcher Committed*)

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh sumber daya yang tersedia yaitu tenaga kerja, keahlian, anggaran dan sarana. Dalam hal ini DP3APPKB memiliki sumber daya yang baik dengan konselor berlatar belakang psikologi berkualitas yang memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan konseling.

Anggaran yang digunakan DP₃APPKB untuk melaksanakan program adalah dengan dana APBD Kota Surabaya. Sedangkan, sarana dan prasarana yang digunakan adalah perangkat komputer/laptop, Zoom berlisensi serta koneksi internet.

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)

Pada pengimplementasiannya, kekuasaan dan kepentingan aktor mempengaruhi hasil pencapaian yang diinginkan. Dalam hal ini, DP₃APPKB memiliki kekuasaan untuk dapat menyebarkan dan melaksanakan kebijakan SIAP-PPAK

Dengan dukungan pelaksana program DP₃APPKB melakukan penyebaran SIAP-PPAK melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, upaya juga dilakukan melalui publikasi di sosial media dan telah dilakukan launching aplikasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya pelayanan yang diberikan oleh DP₃APPKB.

Karakteristik Lembaga (*Institution and Regime Characteristic*)

DP₃APPKB memiliki inisiatif dalam melaksanakan program ini, hal ini terlihat dari adanya penyelenggaraan kelas parenting yang dilakukan secara berkala setiap minggunya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Kelas parenting ini memberikan materi yang bervariasi terkait dengan ketahanan keluarga.

Selain itu, pengembangan SIAP-PPAK dan pelaksanaan telekonsultasi melalui zoom telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat pula baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan penyebaran melalui media informasi.

Kepatuhan dan Daya Tanggap (*Compliance and Responsiveness*)

Sebagai implementor diwajibkan memiliki daya tanggap dan konsistensi untuk mencapai tujuan yang ada dalam kebijakan. Website SIAP-PPAK dalam menu telekonsultasi akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan konsultasi/konseling dengan durasi 45 menit. Klien dapat mengadukan permasalahan pada konselor yang telah di pilih, dan akan dilakukan identifikasi oleh konselor sekaligus menjawab keluhan permasalahan masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Hendra Setiawan mengatakan bahwa jika terdapat klien yang memerlukan konseling/konsultasi lanjutan dan/atau tindak lanjut, maka klien dapat melakukan booking ulang jadwal pada aplikasim dan konselor pun berhak untuk menerima rujukan kepada Psikolog Volunteer apabila hasil telekonsultasi dengan klien perlu dilakukan konseling dengan psikolog secara langsung. Selain itu, rujukan juga dapat di arahkan kepada puskesmas terdekat dari klien.

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan perspektif Grindle pada isi kebijakan atau *content of policy* peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Surabaya telah mengupayakan adanya mandat dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak.

Sementara pada indikator lingkungan implementasi atau *Context of Implementation* Layanan telekonsultasi melalui website SIAP-PPAK terbilang baru yang dirilis oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun pemerintah dalam hal ini DP3APPKB telah mengupayakan pelayanan agar dapat dikenal oleh masyarakat yaitu dengan melakukan penyebaran di media sosial, cetak, maupun elektronik. DP3APPKB pun telah mengupayakan sesi konseling yang berlangsung agar masyarakat lebih aman dan permasalahan yang ada pun teratasi dengan baik. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipaparkan:

1. Adanya sosialisasi terbuka kepada masyarakat secara berkala yang dibentuk berdasarkan unsur terkecil dalam wilayah seperti kelurahan dan/atau RW sehingga penyebaran informasi dan pemahaman dapat merata kepada masyarakat.
2. Adanya peran dari pemerintah dapat memberikan serta menciptakan keyakinan bagi masyarakat yang hendak mengakses pelayanan khususnya pada program telekonsultasi website SIAP-PPAK. Hal ini agar masyarakat mengetahui dan memberikan kepercayaan untuk dapat memanfaatkan program.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya dalam menghadapi permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat salah satunya yakni dengan meluncurkan website SIAP-PPAK, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan konseling/konsultasi dapat mengakses pelayanan lebih mudah, tepat, dan aman. Selain itu, pemerintah menginginkan adanya perubahan dengan dirilisnya website SIAP-PPAK, pemerintah berharap dengan adanya website tersebut dapat secara menyeluruh digunakan oleh masyarakat. Namun, hanya segelintir dari masyarakat yang mengetahui adanya pelayanan ini khususnya pada pelayanan telekonsultasi. Maka dari itu diperlukan adanya peran pemerintah untuk mengupayakan pergerakan dalam penyuluhan program kepada masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Abdullah, L. O. D. (2020). Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia dan Implementasi Regulasi dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Baubau. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–16.
- Fazirah, E. N., Sunariyanto, & Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota). *Jurnal Respon Publik*, 16(8.5.2017), 93–104.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 4 Ayat 2 Poin C terkait Mekanisme Layanan, Fungsi Layanan, dan Sistem Informasi Data.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kota Surabaya. 2011. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 4A terkait Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. (2021). Implementasi kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bandung. *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–725.
- Rahmawati, W. (2018). *Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk E Government di Desa Girikerto*. 143–147.
- Rosita, Wijaya, I. S., & Kusuma, R. H. (2021). Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda. *Journal.Uinsi.Ac.Id*, 2, 30–45. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/TAUJIHAT/article/view/4244>

INTERNET:

- Kusnadar, V. *Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 277 Juta pada 2022*. diakses pada 30 November 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/30/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-tembus-277-juta-pada-2022>